

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan III tahun 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 1,99% (YoY) dan berada pada rentang sasaran Nasional $2,5\% \pm 1$ YoY. TPID Provinsi Gorontalo senantiasa melaksanakan program-program dalam rangka pengendalian inflasi yaitu, pada peningkatan kapasitas produksi guna meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan dan komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi serta melakukan stabilisasi dan monitoring harga secara intensif.

Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, pada bulan Juli 2025 Provinsi Gorontalo mengalami inflasi sebesar 1,34% (mtm), bulan Agustus 2025 mengalami deflasi sebesar 0,73% (mtm), dan bulan September 2025 juga mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm).

Data perkembangan harga pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan pada triwulan III 2025, harga beras IR-64 pada minggu pertama dan kedua bulan Juli 2025 sebesar Rp 15.625 per kg, kemudian pada minggu ke tiga bulan yang sama harganya mulai naik menjadi Rp 16.250 per kg, dan naik kembali pada bulan Agustus 2025 menjadi Rp 16.875 per kg. Namun pada bulan September 2025 harga beras IR-64 mulai turun menjadi Rp 16.250 per kg.

Komoditas bawang merah pada bulan Juli 2025 harganya Rp 60.000 per kg, kemudian bulan Agustus 2025 harganya naik Rp 70.000 – Rp 75.000 per kg dan pada bulan September 2025 harganya mulai turun Rp 40.000 – Rp 55.000 per kg.

Harga komoditas cabai rawit mengalami fluktuasi, pada minggu kedua bulan Juli 2025 harga cabai rawit mencapai Rp 100.000 per kg, kemudian turun hingga harga Rp 50.000 per kg pada bulan Agustus 2025. Namun pada bulan September 2025 harga cabai rawit naik kembali menjadi Rp 60.000 per kg.

Komoditas tomat pada bulan Juli 2025 menyumbang inflasi, harga tomat pada bulan Juli 2025 dikisaran Rp 30.000 – Rp 35.000 per kg, kemudian pada bulan Agustus 2025 harganya turun menjadi Rp 10.000 – Rp 15.000 per kg.

Risiko ke depan, tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo diperkirakan tetap terkendali seiring penurunan harga beras pada masa panen dan meningkatnya realisasi penyaluran beras SPHP. Harga bawang merah juga diperkirakan stabil berkat pasokan dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Paket bantuan Oktober-November diperkirakan dapat menahan tekanan inflasi. Namun demikian, ketidakpastian cuaca berpotensi mengganggu pasokan cabai rawit dan tomat pada fase generatif tanaman.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo Triwulan III 2025 disebabkan dari kelompok *volatile food*. Komoditas BARITO (Bawang, Rica, dan Tomat) pada Triwulan III 2025 mulai mengalami penurunan harga, begitu juga dengan harga beras. Hal tersebut terjadi seiring dengan masuknya musim panen di daerah sentra serta peningkatan stok/persediaan di Provinsi Gorontalo.

Harga beras mulai menunjukkan penurunan harga sejalan dengan masifnya penyaluran beras SPHP melalui berbagai *channel* distribusi serta meningkatnya ketersediaan beras medium dan premium pada periode panen gadu. Penurunan harga bawang merah didorong oleh masuknya pasokan bawang merah dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan seiring dimulainya musim panen yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Oktober 2025.

Sedangkan untuk komoditas tomat dan cabai rawit juga mengalami penurunan harga. Penurunan harga tomat di Provinsi Gorontalo sejalan dengan masuknya pasokan dari beberapa wilayah Sulawesi Utara yang telah mengalami panen raya khususnya dari daerah Langowan raya, Modinding, dan Tombatu. Penurunan harga cabai rawit terjadi seiring dengan meningkatnya pasokan dari Sulawesi Tengah.

Selain penurunan harga komoditas di atas, Masyarakat Gorontalo yang gemar ikan segar dan cumi-cumi, pada Triwulan III harga dan pasokan cumi-cumi relatif stabil, karena komoditas ini banyak ditangkap di perairan pesisir yang tidak terlalu terpengaruh konisi gelombang dan cuaca. Namun untuk harga ikan segar mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh musim penangkapan dan kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas melaut nelayan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai strategi pengendalian inflasi terus dilakukan dan menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk mendorong kembali realisasi inflasi agar tetap berada dalam sasaran target inflasi nasional. Program-program dirumuskan dengan tetap mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi dengan mengedepankan prinsip 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). TPID Provinsi Gorontalo pada Triwulan III tahun 2025 telah melakukan sejumlah upaya pengendalian harga pangan sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

1. Pelaksanaan pasar murah bersubsidi di kabupaten/kota
2. Pelaksanaan GPM dan GPM mobile serentak di kabupaten/kota
3. Penyaluran program bantuan pangan Juni-Juli 2025
4. Penyaluran beras SPHP melalui pengecer, gerai ritel modern, TNI/POLRI, dan GPM

Ketersediaan Pasokan

1. Pemberian sarpras peningkatan produktivitas pertanian PI-KEKDA untuk mendorong produktivitas kelompok tani yang dapat berdampak pada peningkatan pasokan bahan pangan di pasar.
2. Survei dalam rangka pemberian dukungan *greenhouse* ke petani hortikultura untuk meningkatkan produktivitas dan daya tahan petani terhadap cuaca ekstrim.
3. Penanaman komoditas cabai rawit di lahan PT. Gorontalo Citra Lestari (GCL) seluas 2,5 ha
4. Penyerahan bantuan pangan kepada 8.000 KPM yang berisi 5 kg beras, 10 butir telur, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir
5. Penjajakan KAD dengan Provinsi Kalimantan Timur untuk komoditas sapi dimana Gorontalo akan bertindak sebagai pengirim (daerah sentra).

Kelancaran Distribusi

1. Bersinergi dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo untuk pemanfaatan mobil boks Bulog dan distribusi ongkos angkut pada GPM
2. Kerjasama Bulog dengan Koperasi Merah Putih untuk penyaluran beras SPHP
3. Penyaluran beras SPHP pada gerai ritel modern untuk masifikasi penyaluran SPHP
4. Gorontalo sebagai daerah penghasil sapi turut mendukung pengendalian inflasi regional melalui pengiriman sapi dari Gorontalo menuju Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sejumlah 355 ekor pada bulan September dengan memanfaatkan skema tol laut

Komunikasi Efektif

1. Penyelenggaraan HLM TPID Provinsi Gorontalo tanggal 17 Juli 2025 dengan tindaklanjut aktivasi Germas Batari (Gerakan Masyarakat Batanam Rica Sendiri) dan di kantor
 2. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis dengan Bulog untuk percepatan pasokan beras di gerai ritel modern
 3. Bekerjasama dengan media untuk menyebarkan informasi mengenai jadwal pelaksanaan GPM dan penyebaran informasi positif mengenai kegiatan GPM melalui media sosial dan media cetak untuk membentuk ekspektasi masyarakat
 4. Pelaksanaan rapat teknis TPID Provinsi Gorontalo untuk membahas Langkah-langkah antisipatif dalam pengendalian harga beras dan mendorong optimalisasi KAD
 5. Pelaksanaan rapat koordinasi daerah TPID se Provinsi Gorontalo yang membahas perihal upaya masing-masing kota/kabupaten dalam pengendalian harga, serta rencana ke depan.
 6. Sinergi dengan Bulog dalam pelaksanaan sosialisasi aplikasi klikSPHP kepada pengecer dan RPK di Kota dan Kabupaten Gorontalo untuk *debottlenecking* isu penyaluran beras SPHP
 7. Capacity Building TPID Triwulan III 2025 yang menghadirkan narasumber dari Kemendagri membahas materi kepatuhan pelaporan TPID, penyusunan naskah KAD, pemanfaatan IPH, dan penyusunan roadmap TPID
 8. Finalisasi peta jalan TPID Provinsi Gorontalo 2025-2027
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo Triwulan III-2025 adalah inflasi pangan diperkirakan tetap terkendali seiring dengan kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung program swasembada pangan. Kenaikan UMP Gorontalo tahun 2025 sebesar 6,5% menjadi Rp3.221.731 diperkirakan memperkuat daya beli Masyarakat dan konsumsi rumah tangga, sehingga memberikan dorongan positif terhadap perekonomian local tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang signifikan.

Di sisi lain, peningkatan cadangan beras pemerintah serta penyaluran beras SPHP pada triwulan III 2025 diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras. Kebijakan penyaluran bantuan pangan dan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3P) turut menopang upaya pengendalian inflasi. Dengan dukungan berbagai strategi tersebut, tahun 2025 dipandang sebagai momentum pemulihan ekonomi Gorontalo yang mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan stabilitas harga pangan berdasarkan strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada Triwulan III 2025, dalam rangka menjaga pasokan, keterjangkauan harga serta mengendalikan inflasi daerah, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten melakukan hal-hal sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

1. Menghadapi HBKN Natal dan Tahun Baru 2026, diharapkan kepada Bupati/Walikota dan seluruh pihak untuk terus secara masif melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di masing-masing wilayahnya dengan komoditas penyumbang inflasi.
2. Mendorong keterjangkauan harga komoditas bahan pokok melalui pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi dan Gerakan Pangan Murah.
3. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak khususnya beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, minyak goreng, dan daging ayam RAS melalui pemanfaatan *early warning system* (SP2KP/PIHPS BI) atau pemantauan langsung oleh anggota TPID

Ketersediaan Pasokan

1. Memastikan ketersediaan pasokan beras, bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam RAS khususnya menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026.
2. Menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan, khususnya Beras melalui perluasan penyaluran Beras SPHP oleh BULOG

Kelancaran Distribusi

1. Memanfaatkan Jembatan dan Tol laut untuk memperlancar distribusi.
2. Fasilitasi distribusi pangan pada pelaksanaan GPM.

Komunikasi Efektif

1. Mengintensifkan publikasi layanan masyarakat belanja bijak yang bekerjasama dengan RRI dan TVRI serta memanfaatkan media sosial lainnya.
2. Mendorong TPID Provinsi dan Kab/Kota untuk terus memantau pergerakan harga serta persediaan Beras, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan minyak goreng di level distributor dan konsumen serta pengawasan tata niaga sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota secara aktif melakukan pemantauan ketersediaan dan harga sembako khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi.